



KEPAHIANG

SELASA, 11 OKTOBER 2022

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Bupati Akan Bentuk Tim Terpadu

KEPAHIANG - Terkait 1.650 hektare lahan milik Pemkab Kepahiang yang "hilang" berdasarkan hasil audit BPK Tahun Anggaran 2021 beberapa waktu lalu, Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU sepakat untuk membentuk tim terpadu. Tim melakukan penelusuran dokumen atas aset-aset lahan tersebut.

Bupati bahkan mengatakan dalam waktu dekat ini ia akan segera menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang mempersiapkan pembentukan tim terpadu. Tim berisikan unsur pemerintahan, kejaksaan selaku pengacara negara, unsur legislatif, ATR/BPN dan tokoh presidium pemekaran guna mengidentifikasi aset milik Pemkab Kepahiang yang belum jelas statusnya tersebut.

"Tim terpadu ini nantinya bertugas menelusuri dan mengidentifikasi

beber Bupati.

Diketahui, sedikitnya 1.650 hektare lahan yang merupakan aset Kabupaten Kepahiang hilang, atau tidak diketahui statusnya. Hal ini diketahui dari hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemkab Kepahiang tahun 2021 lalu. Dimana didapati beberapa persoalan aset tanah milik Pemkab Kepahiang.

Dari LHP BPK tersebut diketahui 150 hektare pencadangan tanah untuk ibukota Kepahiang di Desa Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan belum dapat ditelusuri. Sejumlah 1.500 hektare tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Kepahiang Indah (KI) hingga saat ini tidak diketahui status tanahnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kepahiang, Candra mengungkapkan, jika berdasarkan catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang merekomendasikan Pemkab untuk membentuk tim terpadu. "Kalau sudah menjadi catatan BPK, maka harus segera ditindaklanjuti. Karena 1.650 hektare lahan tanpa kejelasan tersebut merupakan lahan yang cukup luas dan sangat berguna untuk pengembangan pembangunan daerah kedepan," ujar Candra. (sly)